



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
WISATAHATI

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Laporan Kinerja 2025

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

Jalan Penjajap Timur, Kec. Pemangkat
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
(0562) 242066 | ppn.pemangkat@kkp.go.id

PPN PEMANGKAT
SMART
BERKUALITAS BERKEMAMPUAN BERKONDISI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja dan program yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pedoman pelaksanaan capaian kinerja pada tahun berikutnya. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan ini masih terdapat beberapa kekurangan termasuk target kinerja yang belum tercapai, sehingga saran dan masukan serta dukungan dari seluruh pegawai PPN Pemangkat maupun kerjasama dari *stakeholder* dapat melengkapi dan menyempurnakan laporan kinerja dimaksud.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi institusi PPN Pemangkat pada khususnya, dan masyarakat nelayan pada umumnya

Sambas, Januari 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pemangkat,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Anam Tofani, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh selama tahun 2025. Laporan ini menggambarkan target dan capaian kinerja serta penyajian hasil pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 8 indikator kinerja yang ditargetkan pelaksanaannya pada triwulan IV, adapun hasilnya capaian kinerja PPN Pemangkat pada triwulan IV telah melampaui target yang ditentukan dengan Nilai Kinerja Organisasi 113,65 (Kategori Istimewa).

Jenis	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4
Skor Capaian	110.89	116.26	116.23	114.64	114.63	113.65
Skor Verifikasi	110.89   	116.26   	116.23 	114.64   	114.63	113.65   

Kedelapan belas IKU tersebut adalah Penerimaan PNPB Non SDA dengan persentase capaian **113,09%**, Volume produksi perikanan tangkap dengan persentase capaian sebesar **120%**, Persentase permohonan perusahaan yang di analisa dan/atau dievaluasi dengan persentase capaian sebesar **100%**, Tingkat Kinerja Pelabuhan dengan persentase capaian sebesar **111,78%**, Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan dengan persentase capaian sebesar **100%**, Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas dengan persentase capaian sebesar **113%**, Nilai Pengendalian Lingkungan dengan persentase capaian sebesar **120%**, Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan dengan persentase capaian sebesar **103,23%**, Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal dengan persentase sebesar **120%**, Nilai PM Pembangunan ZI dengan persentase capaian sebesar **114,12%**, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan persentase capaian sebesar **117,65%**, Nilai PM SAKIP dengan persentase capaian sebesar **101,93%**, Indeks Profesionalitas ASN dengan persentase capaian sebesar **101,23%**, Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan dengan persentase capaian sebesar **120%**, Persentase Pengelolaan BMN dengan persentase capaian sebesar **120%**, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan persentase capaian sebesar **104,68%**, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

dengan persentase capaian sebesar **120%**, dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan persentase capaian sebesar **107,51%**.

Mekanisme laporan kinerja tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada laporan ini tersaji analisis capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, dibandingkan dengan capaian pada IKU yang sama pada tahun 2020 s.d. 2024, dibandingkan capaian kerja dengan standar nasional; dalam hal ini dibandingkan dengan PPN Sungailiat dengan rasionalisasi masih dalam satu WPP yang sama yakni WPP 711 (Zona I); selain itu juga disajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dan kegiatan penunjang yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan manusia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja masa yang akan datang. Kami berharap kinerja yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Secara Geopolitis lokasi PPN Pemangkat memiliki nilai strategis, berada di garda depan Laut Natuna Utara, dan berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Konsekuensinya memberikan implikasi positif dan negatif. Implikasi positif memiliki akses pasar luar negeri yang menjanjikan dan implikasi negatif rawan terhadap pelanggaran dan pencurian ikan oleh kapal ikan asing.

Sebagai pelabuhan perikanan yang berada di lingkaran luar, perannya harus dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas fasilitas pelabuhan agar dapat memfasilitasi perkembangan usaha penangkapan ikan yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan, pusat pengumpulan data dan penyuluhan, serta pusat pelayanan informasi. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan kegiatan pengembangan prasarana perikanan tangkap di lingkaran luar wilayah Indonesia (*outer ring fishing port*) dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur manajemen operasional (*good operation and management practice*) dan dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat perikanan (*one-stop shopping fishing port*).

Secara krusial dari beberapa pemanfaatan sumberdaya ikan sudah berada dalam kondisi *overexploited*, seperti udang penaeid, lobster dan cumi-cumi. Kendatipun demikian, sumberdaya ikan demersal, pelagis kecil, pelagis besar dan ikan karang konsumsi masih terbuka peluang untuk dimanfaatkan secara optimal.

Memperhatikan potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya, sumber daya manusia serta permintaan pasar dalam dan luar negeri yang dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menggembirakan untuk produk-produk perikanan seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein yang menyehatkan dan bebas kolesterol, maka sangat memungkinkan untuk membangun industri perikanan

yang kokoh, mandiri dan berkelanjutan serta memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri serta meningkatkan penerimaan devisa Negara yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu perumusan kebijakan pembangunan perikanan tangkap nasional yang tepat, terarah, terpadu dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan sasaran pembangunan perikanan tangkap sebagaimana dijelaskan pada alinea di atas, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah membangun berbagai prasarana perikanan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupa pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap.

Perkembangan armada kapal perikanan yang berada di PPN Pemangkat dan sekitarnya selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat dengan ukuran kapal yang semakin besar. Kecenderungan peningkatan ini diprediksi akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Terutama sebagai akibat kenaikan bahan bakar yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasional penangkapan ikan, khususnya bagi kapal ukuran diatas 30 GT yang beroperasi di WPP NRI 711 (Zona I) akan melakukan relokasi pelabuhan pangkalan dari pulau Jawa (Jakarta, Pekalongan dan Pati) ke wilayah yang berdekatan dengan *fishing ground*, diantaranya ke PPN Pemangkat.

Tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan tangkap di PPN Pemangkat harus didukung oleh kegiatan usaha penunjang berupa industri pendukung dalam kawasan pelabuhan. Antara lain industri galangan kapal, industri perakitan alat tangkap, industri perbankan, industri pengolahan hasil perikanan, suplai perbekalan (air, es dan BBM), sektor pariwisata dan perdagangan.

1.2. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- a. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; dan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 41 A, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Maka fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;\
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;

- l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau pengendalian lingkungan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas “Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan”. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Visi

Selaku Unit Pelaksana Teknis Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengarah pada tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pusat Industri Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat agar Tercapai Pelabuhan Perikanan yang Maju, Berkelanjutan menuju Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera”.

Berdasarkan visi tersebut dapat diartikan bahwa kawasan PPN Pemangkat merupakan titik sentral bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan industri perikanan mulai dari sub sistem penyediaan sarana produksi dan pengolahan hasil perikanan serta sub sistem pemasaran produk. Di sisi lain dalam operasionalnya juga senantiasa mengutamakan pelayanan publik guna mendukung peningkatan produktivitas nelayan dan pengusaha perikanan serta menjaga keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tingkat kelestariannya.

Misi

Untuk dapat mencapai visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tingkat operasional pelabuhan yang secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi perikanan, maka PPN Pemangkat mengemban misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan zona integritas sesuai standar ISO 9001:2015;
2. Peningkatan kompetensi nelayan di pelabuhan perikanan;
3. Peningkatan kontribusi ekonomi melalui investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan;
4. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap melalui penyiapan data dan informasi di pelabuhan perikanan yang akurat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan SDM dan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.

Tujuan

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zona integritas (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan penerapan ISO 9001:2015 dengan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagai alat ukur peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Peningkatan Kompetensi nelayan di PPN Pemangkat dengan melaksanakan bimbingan teknis baik penangkapan ikan, keselamatan pelayaran dan mutu hasil perikanan yang difasilitasi program internal maupun program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Peningkatan investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan dengan melakukan sosialisasi, promosi dan peningkatan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan peluang usaha di PPN Pemangkat;
4. Menyiapkan data dan informasi pelabuhan perikanan yang akurat dengan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh PPN Pemangkat sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap. Adapun perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perencanaan Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	964,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26

5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu. Perjanjian kinerja PPN Pemangkat pada tahun 2025 dilaksanakan antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala PPN Pemangkat.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Anam Tofani**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pemangkat


Anam Tofani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	964,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5

Gambar 1. Perjanjian Kinerja 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. SASARAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun Sasaran Program dan Indikator Kinerja Level I DJPT 2025 yaitu :

1. Kesejahteraan Nelayan Meningkatkan
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
 - a. Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
 - a. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

3.2. SASARAN STRATEGIS PPN PEMANGKAT

Sasaran kinerja yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan upaya mendukung ketercapaian sasaran strategis level I DJPT, maka sasaran strategis dan indikator kinerja PPN Pemangkat disusun berdasarkan indikator kinerja level I DJPT menjadi program-program yang dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja PPN Pemangkat yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut:

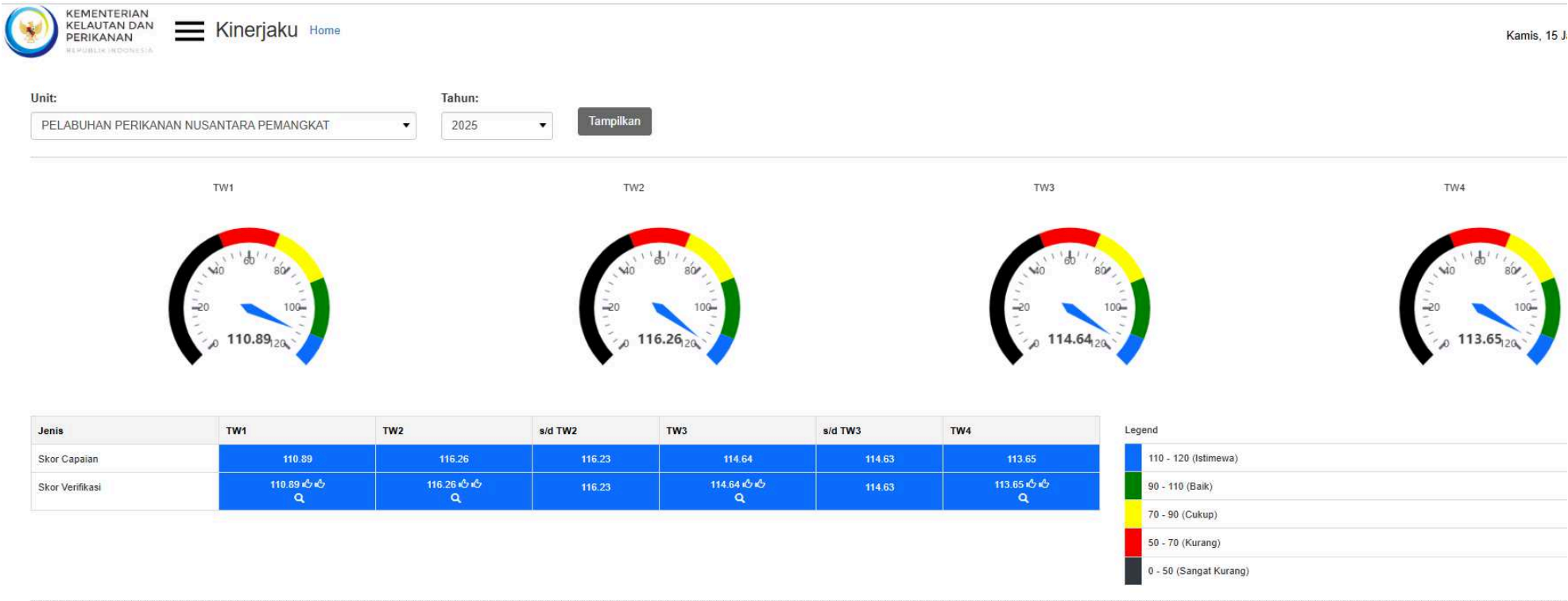
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	954,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5

3.3. CAPAIAN KINERJA PPN PEMANGKAT

Capaian kinerja PPN Pemangkat secara periodik dinilai melalui website resmi kinerja lingkup KKP (kinerjaku.go.kkp.id). Capaian nilai triwulan IV tergambar sebagai gambar 4 berikut. Pada triwulan IV skor capaian kinerja organisasi PPN Pemangkat adalah **113,65** dengan predikat **Istimewa**



Gambar 4. Capaian Kinerja 2025

Capaian kinerja merupakan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam sasaran kinerja PPN Pemangkat. Adapun rincian capaian kinerja PPN Pemangkat triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rincian Capaian Kinerja Triwulan IV 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
				2025		
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	964,73	1.091,06	113,09
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96	2.582,00	120,00
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100	100,00	100,00
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87	97,25	111,78
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100	100,00	100,00
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40	45,21	113,03
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1	95,21	120,00
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496	512,00	103,23
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26	0,33	120,00
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5	86,16	114,12
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85	100,00	117,65
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88	89,70	101,93
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87	88,07	101,23

		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76	100,00	120,00
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81	100,00	120,00
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92	96,31	104,68
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5	94,53	120,00
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5	95,15	107,51

3.4. URAIAN CAPAIAN KINERJA PPN PEMANGKAT

Dalam bab ini dijelaskan capaian setiap indikator kinerja terhadap :

1. Target pada triwulan IV yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kinerja dan rincian target IKU;
2. Perbandingan capaian kinerja pada IKU yang sama pada triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024;
3. Perbandingan capaian kerja dengan standar nasional; dalam hal ini dibandingkan dengan PPN Sungailiat dengan rasionalisasi masih dalam satu WPP yang sama yakni WPP 711 (Zona I).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dan kegiatan penunjang yang telah dilakukan; dan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan manusia.

SS.1 Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap meningkat di PPN Pemangkat

Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 1 yaitu Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat

IK. 1. Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat (Rp. Juta)

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, baik penerimaan fungsional maupun penerimaan umum. Perhitungan indikator ini yaitu nilai akumulasi Penerimaan atas jasa-jasa bulan berjalan. Berikut Capaian Indikator Kinerja Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian IK Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat

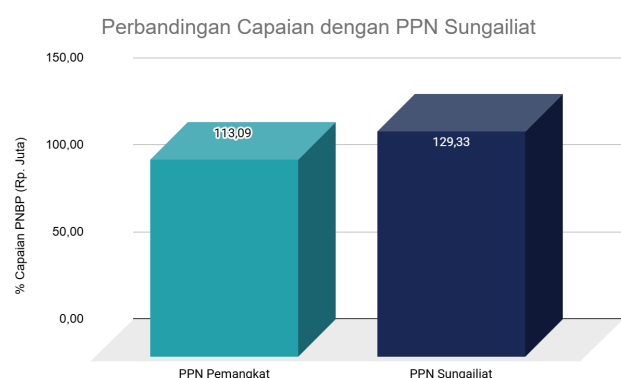
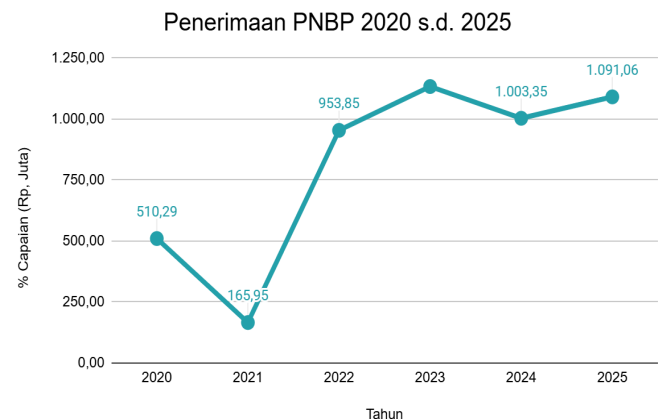
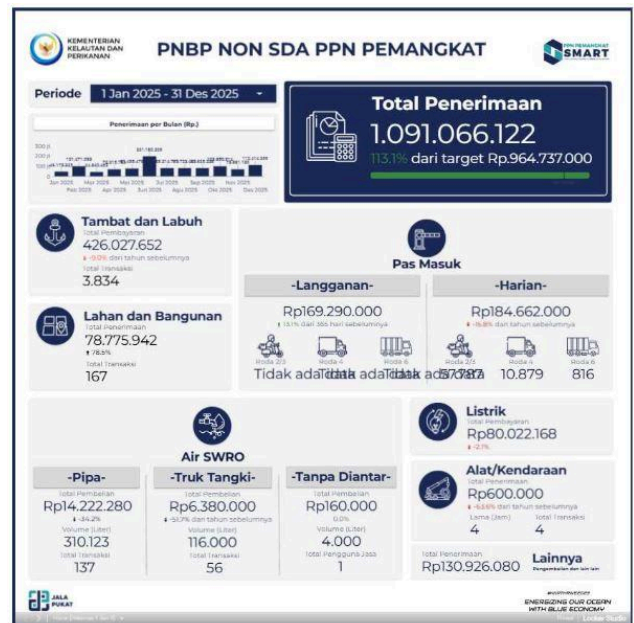
SS-1					Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pemangkat		
IKU-1					Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat (Rp. Juta)		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
510,2	165,9	953,8	1.133,4	1.003,3	964,73	1.091,06	113,09

Sampai dengan akhir Desember 2025 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 964,73 juta, berhasil dicapai dengan realisasi sebesar Rp. 1.091,06 juta, dengan persentase sebesar 113,09%. Perbandingan capaian dari tahun 2021 s.d. 2025 sebagaimana tergambar pada diagram disamping, terlihat tren kenaikan capaian dari tahun 2021 s.d. 2025.

Indikator kinerja PNBPN ini dilaksanakan oleh semua UPT lingkup DJPT. Capaian indikator kinerja PNBPN PPN Pemangkat jika dibandingkan dengan capaian pada indikator yang sama pada PPN Sungailiat maka tergambar sebagaimana gambar disamping. Persentase capaian PNBPN pada PPN Pemangkat lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian pada PPN Sungailiat.

Capaian ini dikarenakan peran serta seluruh komponen mulai dari petugas pelayanan dan pengguna jasa yang berada di lingkungan PPN Pemangkat. Selain itu, untuk PNBPN Non SDA terdapat perbaikan data dan system dalam pendataan sehingga data yang dicapai menjadi akuntabel.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini disebabkan oleh kinerja ASN (PNS dan PPPK) yang membaik sehingga pelayanan yang dulu belum ditangani secara optimal, saat ini dengan sistem yang baru berdampak pada



peningkatan pelayanan menjadi lebih baik. Dari sisi anggaran, untuk mendukung IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 7.654.000,00 sampai dengan Desember terealisasi sebesar 7.653.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SOP jasa ke Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan pada bulan Desember 2025.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan tercapainya peningkatan IKU ini diantaranya adalah :

1. Penggunaan aplikasi JALA PUKAT untuk pemungutan jasa kepelabuhanan (Pengadaan Air Bersih, Sewa Alat Berat, Listrik, Pas Masuk), dengan aplikasi tersebut data jasa kepelabuhanan dapat berekonsiliasi dengan baik;
2. Penggunaan aplikasi SIJAKA untuk penarikan jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penertiban Pas Masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Dalam hal penertiban pas masuk terdapat permasalahan yang dihadapi yakni kurang efektif dan efisiennya sistem, karena masih menggunakan sistem manual. Rekomendasinya adalah kedepan supaya ada peningkatan sistem pas masuk menggunakan portal semi otomatis.

SS.2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pemangkat meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 2 yaitu Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)

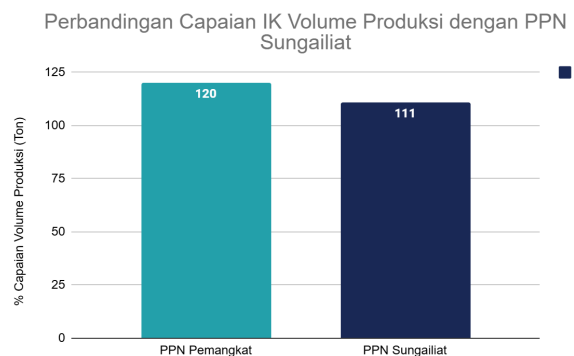
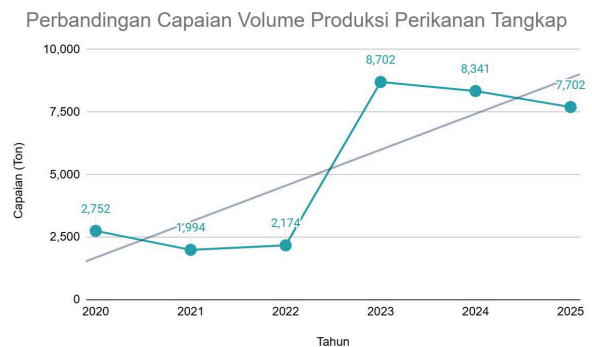
IK. 2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan pengukuran jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan oleh kapal penangkapan ikan di PPN Pemangkat. Berikut capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap periode triwulan IV tahun 2025 sebagaimana tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Capaian IK Volume Produksi Perikanan Tangkap 2025

SS-2					Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat Meningkat		
IKU-2					Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat (Ton)		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
9.023,2	2.099,5	8.764,8	13.228,0	11.422,0	9.090,96	12.582,00	120,00

Capaian pada IK Volume Produksi Perikanan Tangkap ini sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar 12.582,00 ton. Target untuk triwulan IV atau sama dengan target tahunan yaitu sebesar 9.090,96 ton, sehingga persentase capaiannya adalah 120%. Indikator kinerja ini telah dilaksanakan secara lima tahun berturut-turut, adapun perbandingan capaiannya tampak fluktuatif sebagaimana gambar disamping dengan capaian maksimum pada triwulan III 2023.



Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan beberapa UPT Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka capaian Volume Produksi PPN Pemangkat masih lebih besar jika dibandingkan PPN Sungailiat.

Adapun keberhasilan peningkatan kinerja pada IKU ini adalah pencatatan data produksi dengan baik melalui system *online* (Aplikasi PEDATI) setiap kapal yang melakukan pembongkaran di dermaga maupun kapal angkut ikan yang masuk dari pelabuhan lain (*port to port*) tercatat dengan baik serta ikan yang masuk melalui pengangkutan dari darat.

Dalam upaya pencapaian target volume produksi, didukung dengan anggaran dan sumber daya manusia. Peningkatan kinerja petugas pendata dan keaktifan penginputan pada aplikasi PIPP memberikan pengaruh positif terhadap pendataan produksi. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 4.919.000,00, dengan rincian kegiatan pendukung diantaranya adalah Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.640.000,00 pada bulan Desember dan Operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebesar Rp. 3.119.000,00, terealisasi sebesar Rp. 3.095.000,00 pada bulan Nopember. Sampai dengan akhir Desember total realisasi sebesar Rp. 4.735.000,00.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah adanya

1. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan; dan
3. Penggunaan aplikasi PIPP.

SS.3 Pengelolaan PPN Pemangkat yang Optimal dan Bertanggung jawab

Terdapat 3 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi, Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai) dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen).

IK. 3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Penanggung jawab indikator kinerja ini adalah Tim Kerja TKPU yang pelaporannya bersifat tahunan.

Capaian IK Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi

SS-3					Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing		
IKU-3					Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau dievaluasi (Persen)		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	-	-	100	100	100	100	100

Tingkat ketercapaian IKU ini pada tahun 2025 adalah 100%, hal ini dikarenakan adanya pendelegasian yang jelas terhadap pegawai yang menangani, monitoring dari ketua tim kerja dan tanggung jawab serta komitmen pegawai yang bersangkutan, hal ini tercermin dalam laporan SKP.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya

1. Melakukan evaluasi dan rekap data jangka waktu kontrak pengusahaan di lingkup PPN Pemangkat secara berkala oleh petugas; dan
2. Kegiatan Evaluasi Penggunaan Fasilitas dan Penggunaan Sistem Informasi Pengusahaan (SIPAUS);

Dari sisi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 20.840.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 20.270.000,00 pada bulan Nopember.

IK. 4. Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai)

Indikator kinerja PPN Pemangkat merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Pengukuran

terhadap capaian indikator Tingkat Kinerja adalah berdasarkan hasil rata-rata nilai evaluasi pada aplikasi PIPP selama triwulan I 2024 dengan kriteria sebagai berikut :

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)

2. E-logbook

3. Aplikasi SPB-online

4. SHTI

5. Realisasi Penyerapan Anggaran

6. Pendapatan Pelabuhan

7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan

8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan

9. Panjang Dermaga

10. Kedalaman Kolam

11. Sarana Perbaikan (*docking*, bengkel)

12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan

13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan

14. Pelayanan Tambat Labuh

15. Produksi Perikanan
16. Frekuensi Kunjungan Kapal

17. STBLK

18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

19. Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi

20. Pelaksanaan K5

21. Penyaluran Air Bersih (kapal dan industry pengolahan)

22. Penyaluran Es (Kapal)

23. Penyaluran BBM (kapal)

24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP

25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan

26. Penyerapan tenaga Kerja

27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Capaian kinerja IK tersebut tersaji dalam tabel 7 berikut

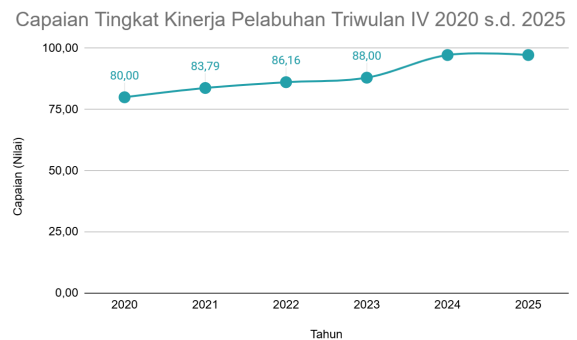
Tabel 7. Capaian IK Kinerja PPN Pemangkat

SS-3					Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing		
IKU-4					Tingkat Kinerja PPN Pemangkat		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
80,00	83,79	86,16	88,00	97,25	87,00	97,25	111,78

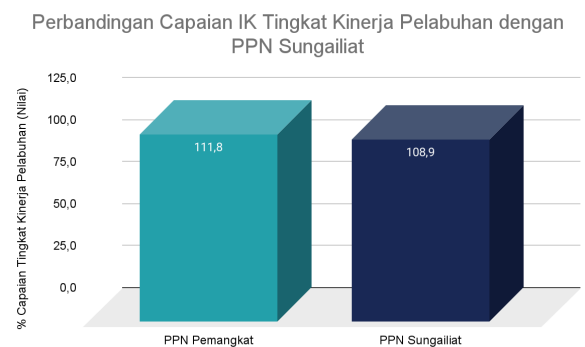
Berdasarkan tabel di atas, didapat bahwa realisasi capaian IKU Tingkat Kinerja adalah 97,25 atau persentase capaian sebesar 112% dari target tahunan yang telah

ditentukan. Perlu disampaikan bahwa target triwulan maupun tahunan adalah sama yakni 87.

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, maka terlihat tren kenaikan sebagaimana gambar di samping, dan tahun 2025 masih sama dengan 2024.



Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, capaian tingkat kinerja PPN Pemangkat sedikit tingkat lebih tinggi jika dibanding PPN Sungailiat. Indikator ini dapat tercapai karena adanya pendataan yang membaik dan penginputan di aplikasi PIPP yang aktif petugas.



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini adalah dengan bertambahnya SDM (PPPK dan petugas data) sehingga dapat terbantu dalam hal penginputan kegiatan operasional pelabuhan pada aplikasi PIPP. Dari segi anggaran, terdapat pagu sebesar Rp.143.010.000,00 untuk operasional kegiatan:

- Pembinaan pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan inspeksi pengendalian mutu di Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 1.800.000,00 dan telah terealisasi semuanya. pada bulan Desember.
- Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan sebesar Rp. 34.305.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.286.700,00 pada bulan Oktober.
- Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 106.905.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.203.200,00 pada bulan Desember.

Dari total pagu anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar Rp. 138.289.900,00 atau sebesar 96,0%. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah :

1. peningkatan kompetensi petugas operator aplikasi PIPP melalui Bimtek;
2. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan; dan
4. Peng-*entry-an* data hasil produksi perikanan yang secara kontinyu pada aplikasi PIPP.

IK. 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan yang diterbitkan. Adapun pembobotannya adalah sebagai berikut

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%);
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%); dan
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%).

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru ada pada triwulan IV 2023. Sesuai dengan manual IKU, periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, untuk laporan triwulan IV 2025 tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

SS-3					Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing		
IKU-5					Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	-	-	100	100	100	100	100

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator baru yang ada pada triwulan keempat 2023. Jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 dan 2025 capaiannya 100% yang mana sama dengan capaian terhadap target tahunan. Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, PPN Pemangkat sedikit lebih rendah 17,7 poin sebagaimana gambar diagram berikut.

Untuk mendukung IKU ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 39.897.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.291.000,00 atau sebesar 98,480% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

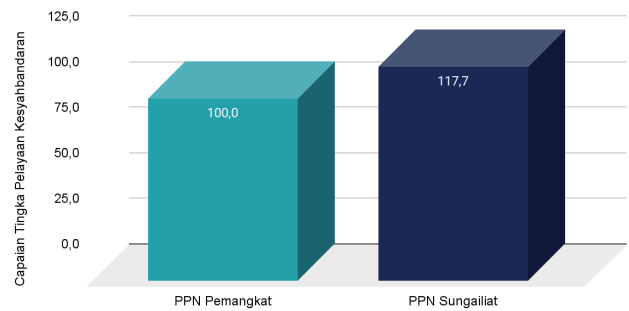
a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran

Dalam Rangka dalam rangka mendukung PNPB Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), anggaran Rp. 36.747.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.351.000,00, yang dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember.

b. Pengelolaan dan Operasional Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan, anggaran Rp. 1.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.390.000,00 yang dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember.

c. Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi, anggaran Rp. 1.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.550.000,00 yang dilaksanakan pada bulan Nopember.

Perbandingan Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran dengan PPN Sungailiat



Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian ini adalah :

1. Penggunaan aplikasi Teman SPB dalam pelayanan kesyahbandaran;
2. Petugas secara rutin melakukan rekonsiliasi data SPB, STBLK dan SHTI; dan
3. Petugas melakukan pelayanan dengan baik pada pengguna jasa.

IK. 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

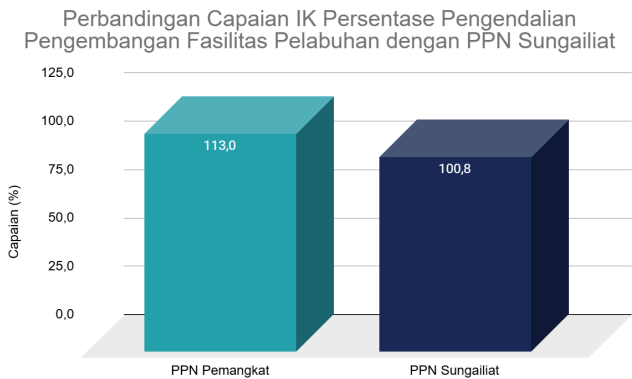
Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas

pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sesuai dengan perubahan perjanjian kerja kedua. Adapun perhitungannya didasarkan pada persentase pengembangan fasilitas yang telah dilakukan dibandingkan dengan *master plan* yang dimiliki oleh PPN Pemangkat. Pengukuran indikator ini bersifat tahunan sehingga hasil pengukuran belum dapat tersaji dalam laporan triwulan IV 2025.

Tabel 9. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

SS-4					Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pemangkat yang Optimal		
IKU-6					Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	-	-	175,00	45,21	40,00	45,21	113,03

Pada tahun 2025 PPN Pemangkat memiliki target IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan sebesar 40 persen. Sesuai dengan manula IKU periode pelaporannya secara tahunan, sehingga belum bisa diukur capaiannya baik dengan target triwulanan. Pelaporan IKU ini dilakukan oleh seluruh UPT lingkup DJPT secara serentak pada akhir tahun. Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, PPN Pemangkat sedikit lebih tinggi yaitu 13,8 poin sebagaimana gambar disamping.



Bercermin pada keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan karena telah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pada tahun 2023 dengan baik seperti pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, pemeliharaan jalan komplek, perbaikan dan penambahan jaringan (*bandwidth*) internet, pemeliharaan dan penambahan jaringan CCTV,

perbaikan *drainase*, pemeliharaan dan perbaikan jaringan air bersih, pemeliharaan dermaga dan pemeliharaan pagar keliling.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan bertambahnya SDM dari penambahan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat berkerja dengan baik. Selain itu adanya pembagian tugas kepada anggota Tim Kerja TKPU sebagai penanggung jawab untuk setiap item pekerjaan. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 487.730.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 486.220.386,00 atau sebesar 99,69% digunakan untuk kegiatan :

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran alokasi sebesar Rp.482.280.000,00 terealisasi sebesar Rp.480.770.386,00.
- b. Penyusunan Dokumen KKPR alokasi sebesar Rp.5.450.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.450.000,00.

IK. 7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan (Nilai)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formula UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menyelenggarakan kegiatan pengendalian lingkungan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang baru ada pada perjanjian kerja kedua. Capaian indikator tersaji pada tabel 10 di bawah ini

Tabel 10. Capaian IK Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

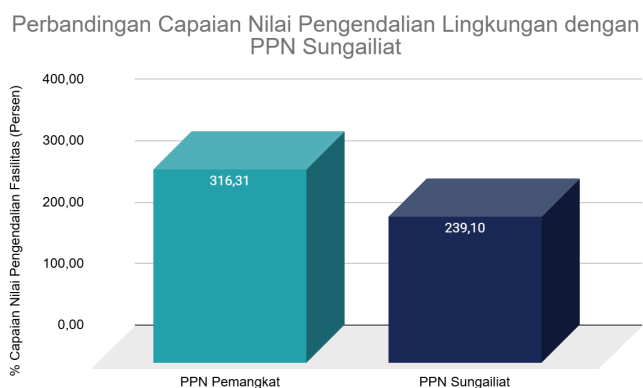
SS-4					Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pemangkat yang Optimal		
IKU-7					Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Pemangkat (Nilai)		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	-	-	83,71	82,51	30,10	95,21	316

Pada tahun 2025 PPN Pemangkat memiliki target IKU Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan sebesar 30,10, jika dibandingkan dengan target tahun lalu, mengalami kenaikan sebesar 0,9. Adapun target setiap triwulan sama dengan target tahunan yakni 30,10. Pada triwulan IV 2025 ini tercapai nilai sebesar 95,21 atau dengan persentase sebesar 316%.

Dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru ada pada triwulan IV 2023, maka capaian pada triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan IV pada kurun waktu tahun 2021 s.d. 2023. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV 2024, yaitu 82,71 maka mengalami kenaikan sebesar 6,75 atau sebesar 8,2%.

Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan standar nasional atau dengan UPT dalam satu WPP 711 (PPN Sungailiat) dapat dilihat pada gambar berikut. Terlihat capaian Nilai Pengendalian Fasilitas pada PPN Pemangkat lebih tinggi jika dibanding dengan capaian pada PPN Sungailiat. Sesuai dengan surat dinas Direktur

Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.3258/DJPT.4/PI.310/X/2025, tanggal 14 Oktober 2025, hal Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan III TA. 2025 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, capaian PPN Pemangkat pada kategori Sangat Baik dengan peringkat keenam dari 22 UPT lingkup DJPT.



Keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU ini karena terpenuhinya dokumen yang diperlukan dalam standar penilaian pada Aplikasi Selaraskan. Secara berkala setiap bulan dilakukan monitoring pemenuhan dokumen dengan *lead* dari Tim Kerja TKPU. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan karena keterlibatan seluruh SDM dari lintas Tim Kerja dalam pemenuhan dokumen penilaian Selaraskan. Untuk mendukung IKU Nilai Pengendalian lingkungan Pelabuhan Perikanan mendapat pagu anggaran sebesar Rp.10.900.000,00 dan sampai dengan akhir triwulan IV terealisasi sebesar Rp.10.317.000,00 atau sebesar 94,65% untuk pelaksanaan kegiatan K5 di Pelabuhan Perikanan.

SS.4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di PPN Pemangkat

Terdapat 2 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 4 yaitu Pengelolaan Awak Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di PPN Pemangkat yaitu IKU 8 dan IKU 9.

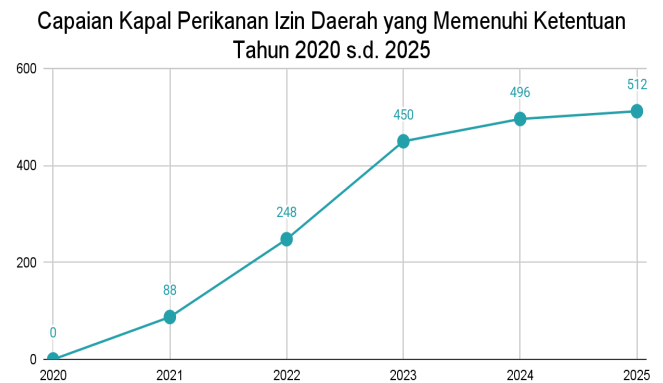
IK. 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja ini menunjukkan Jumlah kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Sesuai dengan manual IKU-nya, perhitungannya capaian pada triwulan III merupakan penjumlahan capaian pada tahun 2023 dan 2024 ditambah capaian pada triwulan III. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

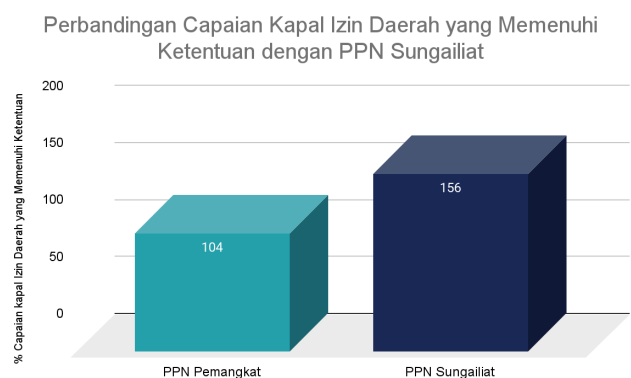
Tabel 11. Capaian IK Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SS-5					Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pemangkat		
IKU-8					Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	87,5	248	450	496	490	512	104

Diketahui bahwa capaian triwulan IV tahun 2025 adalah 512 kapal dari target triwulan IV sebanyak 494 kapal atau sebanyak 18 kapal. Target tahunan adalah sebesar 496 kapal dan target triwulanan sebesar 494 kapal. Sehingga jika dibandingkan dengan target tahunan maka persentase capaian sebesar 104%.



Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2023, maka terjadi lonjakan pada tahun 2025, capaian sebagaimana tersaji pada gambar di samping. Jika dibandingkan dengan capaian pada PPN Sungailiat, persentase capaian PPN Pemangkat lebih rendah sebagaimana tersaji pada gambar di samping.



Tingkat ketercapaian IK ini dikarenakan patuhnya kapal perikanan dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebelum masa berlakunya berakhir. Disamping itu, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023, sangat membantu pemilik kapal karena pemilik kapal dapat mengajukan pembaruan SKKP tanpa proses pemeriksaan kelaikan dan masa berlaku SKKP tersebut lebih panjang dari sebelumnya hingga sampai dengan 31 Desember 2024. Disamping itu, tingkat capaian ini dipengaruhi banyaknya pengajuan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dari kapal perikanan izin daerah yang berada di Pelabuhan Binaan seperti PP Kuala Singkawang, PPP Sungai Rengas, dan PP Sungai Kakap. SKKP merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dalam mendukung pencapaian IKU dokumen kapal perikanan yang diterbitkan didukung dengan tim SKKP yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang koordinator dan 5 orang verifikator. Kesemuanya masuk kedalam surat tugas kepala Pelabuhan Nomor B.2152/PPN.PMK/KP.440/VIII/2023.

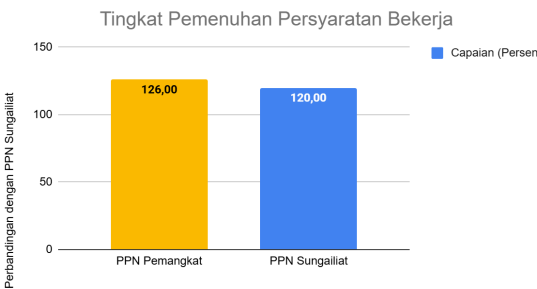
IK. 9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang bersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Adapun formula perhitungannya adalah persentase jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL dan telah tersertifikasi dibandingkan dengan seluruh jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL. Sesuai dengan manual IKU, pelaporan IK ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat tersaji datanya pada laportahun sebelumnya.

Tabel 12. Capaian IK Nilai Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

SS-4					Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		
IKU-9					Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)		
Realisasi Triwulan IV					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	-	-	-	-	0,26	0,33	126

Dikarenakan pelaporannya bersifat tahunan maka tidak dapat dibandingkan dengan target triwulan IV 2024 dan capaian triwulan IV tahun-tahun sebelumnya. Secara serempak IK ini dilaporkan secara tahunan oleh seluruh UPT lingkup DJPT. Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, PPN



Pemangkat sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 6 poin.

Pelaksanaan Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL dengan perbandingan capaian terhadap pelabuhan lain, sebagaimana grafik di atas.

Faktor penentu keberhasilan capaian yaitu kesadaran nelayan sebagai pelaku utama dan pemilik kapal sebagai pelaku usaha, ketersediaan petugas kesyahbandaran sebagai fasilitator Perjanjian Kerja Laut (PKL). Petugas telah melaksanakan PKL dengan beberapa nelayan yang difasilitasi oleh PPN Pemangkat. Keberhasilan Sosialisasi terkait perlindungan awak kapal perikanan oleh Tim Kerja Kesyahbandaran PPN Pemangkat dan antusiasme nelayan dan kesadaran terkait risiko kerja di kapal perikanan menyebabkan banyaknya nelayan mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Juga andil pemilik kapal mengajak diskusi seluruh ABK kapalnya agar mau menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang kemudian disahkan oleh Syahbandar di PPN Pemangkat. Sehingga persentase Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan mencapai target.

SS.5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

IK. 10. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat (nilai)

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tabel 13. Capaian IK Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat

SS-7					Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat		
IKU-10					Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat		
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
82,41	62,13	77,00	90,90	92,52	80,00	86,16	114,00

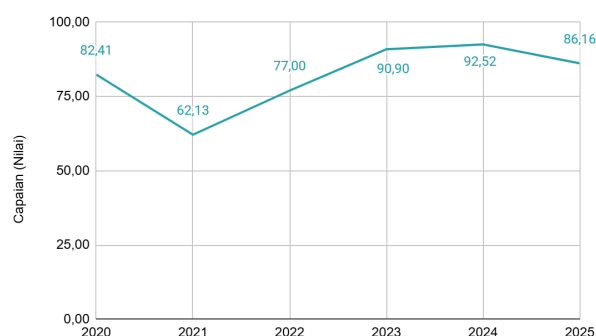
IKU Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat sesuai dengan manual IKU, pelaporannya bersifat tahunan, dengan capaian pada triwulan IV yaitu 86,16 dengan persentase capaian terhadap target tahunan sebesar 114%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 6,36 poin. Capaian nilai PM ZI PPN Pemangkat dari tahun 2020 s.d. 2025 sebagaimana tersaji pada grafik di atas.

Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat capaian PPN Pemangkat sedikit lebih rendah yaitu sebesar 4 poin yang disajikan sebagaimana gambar di samping.

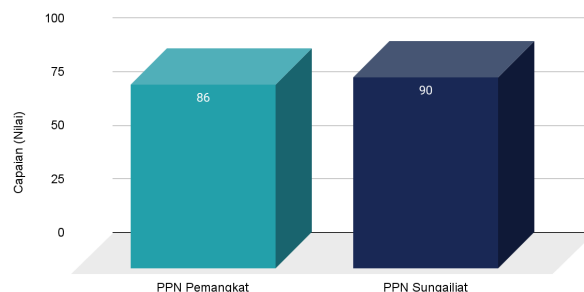
Dalam mendukung pencapaian IKU ini, dialokasikan anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.260.000,00 pada bulan Desember.

Dalam pelaksanaan ZI WBK di PPN Pemangkat, terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU tersebut, antara lain:

Capaian IK Nilai PM Pembangunan ZI Tahun 2020 s.d. 2025



Perbandingan Capaian IK Nilai PM Pembangunan ZI dengan PPN Sungailiat



1. Adanya rapat yang dilakukan secara berkala agar terkontrolnya progress pemenuhan data dukung;
2. Adanya pengerjaan dokumen data dukung yang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam LKE;
3. Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

IK. 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pemangkat

Indikator kinerja ini merupakan hasil pengawasan Itjen kepada PPN Pemangkat berdasarkan LHP yang telah terbit pada triwulan III 2024 s.d. triwulan II 2025 yang telah ditindaklanjuti oleh PPN Pemangkat dan menjadi objek pengawasan. Adapun sampai dengan akhir triwulan IV 2025 capaiannya adalah sebagai berikut

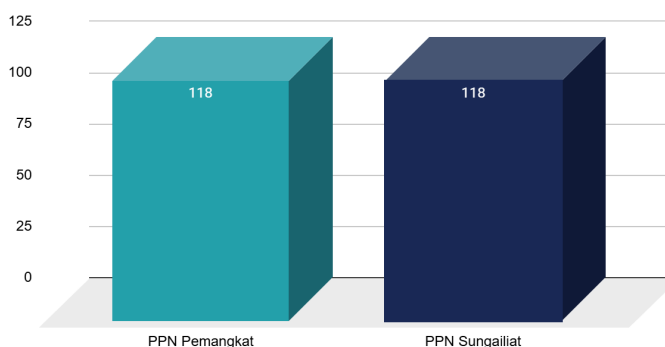
Tabel 14. Capaian IK Persentasi Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk Perbaikan Kinerja

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat			
IKU-11				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pemangkat			
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	-	100	100	100	85	100,0	118

Sampai dengan akhir Desember tahun 2025 dari target yang telah ditetapkan sebesar 85 berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100 dengan persentase sebesar 118%. Target tahunan maupun target triwulan memiliki besaran yang sama, sehingga persentase capaiannya sama yakni 118%. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 s.d. 2024.

Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat maka persentase nilai capaiannya sama yaitu 118% (pembulatan).

Perbandingan Capaian IK Nilai Rekomwas dengan PPN Sungailiat



Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Digunakan untuk Perbaikan Kinerja didukung oleh penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Nomor tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan tentang Evaluasi Pelayanan Publik. Semua data dukung sesuai rekomendasi pada LHP Inspektorat Tersebut tersebut diatas telah disampaikan ke Inspektorat Jenderal dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Secara umum, sampai dengan akhir triwulan III 2025 tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan saran hasil evaluasi/pengawasan Inspektorat Jenderal serta melakukan koordinasi secara intensif kepada Inspektorat Jenderal dan DJPT.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, didukung dengan sumber daya manusia dalam bentuk tim pengelolaan kinerja dan tim pelayanan publik. Kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara online dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien baik dari segi sumber daya manusia dan waktu penyelesaiannya. Adapun dari segi anggaran kegiatan ini tidak terdapat anggaran dikarenakan sudah menggunakan Aplikasi sidak.kkp.go.id dalam pengawasan dan tindak lanjut.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN) (Perjalanan dalam rangka penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup DJPT).

IK. 12. Nilai PM SAKIP PPN Pemangkat (Nilai)

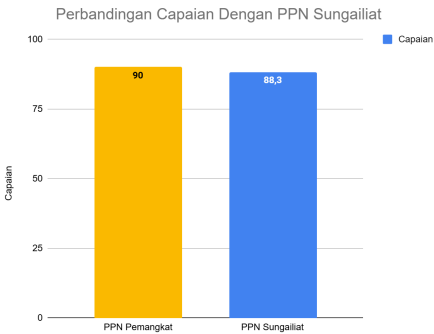
Penilaian Mandiri SAKIP merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (20%). Capaian indikator kinerja ini dihitung dari hasil penilaian atas

implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian indikator ini tersaji pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Capaian IK Nilai PM SAKIP PPN Pemangkat

SS-5							
IKU-12					Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)		
Realisasi Triwulan IV					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	-	-	-	-	88	90	102

Capaian IKU ini pada triwulan IV 2025 adalah 90, jika dibandingkan dengan capaian terhadap target tahunan adalah sebesar 102%. Jika dibandingkan dengan capaian PPN Sungailiat PPN Pemangkat sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 1,7 poin sebagaimana gambar di samping.



Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menggunakan Aplikasi E-sakip Reviu dalam penyampaian dokumen pemenuhan SAKIP, serta telah dilakukan reviu secara berkala terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan dokumen SAKIP ditentukan oleh kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui E-SAKIP yang terintegrasi, dan kualitas monev kinerja serta pemanfaatan hasil monev kinerja sebagai umpan balik perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja. Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja. Langkah yang akan dilakukan antara lain menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan melakukan sosialisasi dan dialog kinerja kepada seluruh pegawai.

Dalam mendukung ketercapaian IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Dari segi anggaran, telah disediakan pagu anggaran sebesar

Rp.3.900.000,00 untuk kegiatan Monitoring Kinerjaku, sampai akhir triwulan IV terealisasi sebesar 3.480.000,00. Program yang menunjang capaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja yaitu program dukungan manajemen–layanan manajemen keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja pada tahun 2024 yaitu meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja dalam pengelolaan kinerja dan penganggaran sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Mengintegrasikan aplikasi e-SAKIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran lingkup KKP serta peningkatan kualitas monev Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan memanfaatkan secara optimal hasil monev untuk umpan balik perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

IK. 13. Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat (Persen)

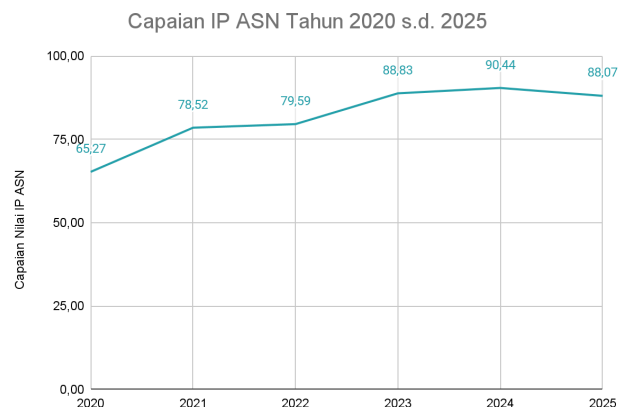
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan Indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independent. Penilaian indikator ini berdasarkan penilaian pada website ropeg.kkp.go.id yang diukur menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari Riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari di bawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat, Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan Disiplin Pegawai, diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Berikut adalah capaian indikator IP ASN PPN Pemangkat 2025 (Tabel 16).

Tabel 16. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat

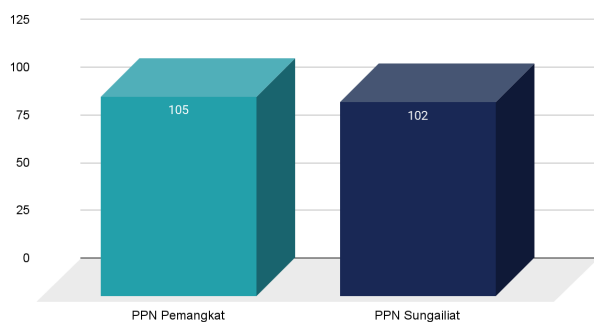
SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat			
IKU-13				Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat			
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
65,27	78,52	79,59	88,83	87	84	88,07	105

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan II dan IV 2025. Jika dibandingkan dengan target tahunan realisasi triwulan IV mengalami peningkatan 4,07 poin dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 105%. Capaian IP ASN PPN Pemangkat tahun 2025 yaitu 88,07 mengalami penurunan 2,37 poin dari tahun 2024 yaitu 90,44 dan merupakan puncak capaian dalam 5 tahun terakhir yang disajikan sebagaimana grafik di samping.



Perbandingan capaian IK IP ASN dengan PPN Sungailiat terlihat bahwa PPN Pemangkat sedikit lebih tinggi yaitu 3 poin sebagaimana gambar disamping. Tim Kerja Dukungan Manajerial telah mengakomodir peningkatan IP ASN Pegawai PPN Pemangkat melalui berbagai diklat. Komitmen

Perbandingan Capaian IK IP ASN dengan PPN Sungailiat



keterlibatan pimpinan dalam pencapaian IP ASN diturunkan melalui memorandum Kepala Pelabuhan Nomor 40/PPN.PMK/KP.510/II/2025, tanggal 1 Februari 2025 tentang Perintah Mengikuti Pengembangan Kompetensi.

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh keaktifan dan partisipasi semua pegawai, dengan penanggung jawab IKU sebanyak 2 orang pengelola kepegawaian. Dari sisi

anggaran, untuk mendukung IKU ini dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Gaji dan Tunjangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Operasional Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.421.451.000,00, telah terealisasi sebesar Rp. 8.222.827.994,00 atau jika dipersentase sebesar 97,64%.

IK. 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Pemangkat (persen)

Indikator Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa (20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Berikut adalah capaian persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Pemangkat 2025 (Tabel 17).

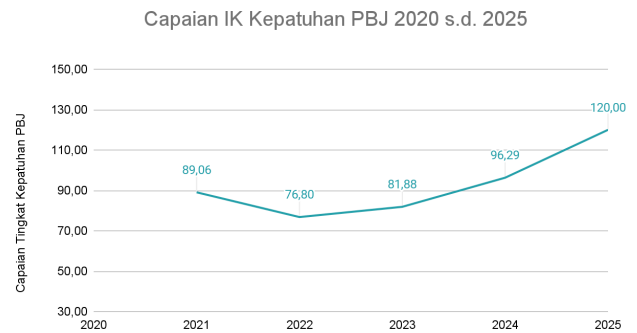
Tabel 17. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat			
IKU-14				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pemangkat			
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	89,06	76,80	81,88	96,29	80,00	100,00	131,00

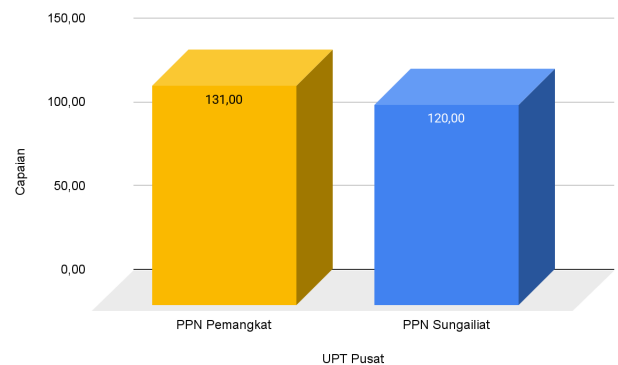
Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang diumumkan pada SIRUP pada triwulan IV ini adalah 100%. Capaian ini berdasarkan nota dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025, hal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang

Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan tahunan maka persentasenya adalah 131,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 96,29 capaian di tahun 2025 yaitu 100 mengalami kenaikan 3,71 poin. Capaian dari tahun

2020 s.d. 2025 dapat dilihat dari diagram disamping yang puncaknya yaitu pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat capaian PPN Pemangkat sedikit lebih tinggi yaitu 11 poin sebagaimana gambar disamping.



Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan identifikasi kegiatan Barang/Jasa pada akhir tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat sesuai dan tepat sasaran. Indikator ini menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaporan dan



kesesuaian kelengkapan dokumen yang diunggah pada aplikasi SIRUP dan kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PPN Pemangkat. Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kedudukan berarti dalam penerapan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian baik nasional maupun daerah. Seiring berkembangnya situasi kondisi perekonomian dunia maupun dalam negeri yang tidak menentu, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan dan penerapan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2024 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan adanya reviu perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga dokumen tender menjadi *valid*. Proses pengadaan barang sudah dilakukan dengan menyesuaikan jenis dan spesifikasinya yang memenuhi komponen TKDN melalui *e-purchasing* sehingga dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku. Langkah yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi terkait *reviu* perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal.

Dalam mendukung ketercapaian IKU ini, SDM yang terlibat adalah 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen. Keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat PBJ dan PPK sehingga pelaksanaan keduanya ditugaskan pada pegawai dengan jabatan fungsional P3T dan AP3T yang telah memiliki sertifikat tersebut. Dalam hal anggaran, IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp.6.800.000,00 untuk melaksanakan kegiatan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa). Sampai dengan akhir triwulan IV 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 6.800.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 100%.

IK. 15. Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%) ;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot 20%) ;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%); dan

5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Berikut adalah capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada PPN Pemangkat.

Tabel 18. Capaian IK Pengelolaan BMN

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat			
IKU-15				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pemangkat			
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	96,25	96,25	93,75	90,00	81,00	100,00	123,46

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan III dengan capaian triwulan III tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target pada renstra. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2025. Capaian pada tahun 2025 dengan persentase 123,46% merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik di samping.



Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu banyak BMN yang rusak berat tetapi masih tercatat pada SIMAK BMN dan belum dilakukan penghapusan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pelelangan barang dengan kondisi rusak berat melalui KPKNL. Serta telah ditetapkan PSP terhadap bangunan dan peralatan yang diadakan tahun 2023 dan melakukan inventarisasi BMN.

Pelaksanaan IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar

Rp.4.320.000,00, diperuntukan dalam kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Honorarium pengurus/penyimpan BMN tingkat kuasa pengguna barang). Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 4.320.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 100%. Sumber daya manusia yang mendukung penuh IKU ini adalah 3 (tiga) orang pengelola BMN dan dibantu 1 orang P3K yang menangani sarana dan prasarana.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Pelaporan Keuangan dan BMN. Inventarisasi BMN serta kegiatan lain berupa pemeliharaan, peningkatan nilai dari aset yang dilakukan oleh PPN Pemangkat. Melaksanakan penghapusan BMN setelah menerima Surat persetujuan penghapusan BMN, melakukan revisi RK BMN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

IK. 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)

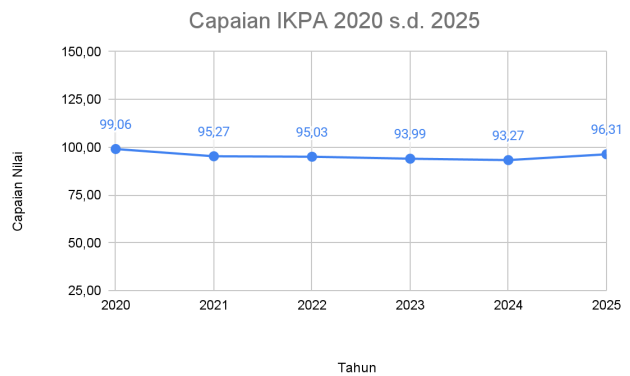
Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output. Perhitungan secara sistem pada aplikasi OM-SPAN yang mengacu pada lampiran Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : ND-964/P33.2/2019, tanggal 29 Maret 2019. Berikut adalah capaian indikator tersebut pada 2025.

Tabel 19. Capaian IK Nilai IKPA

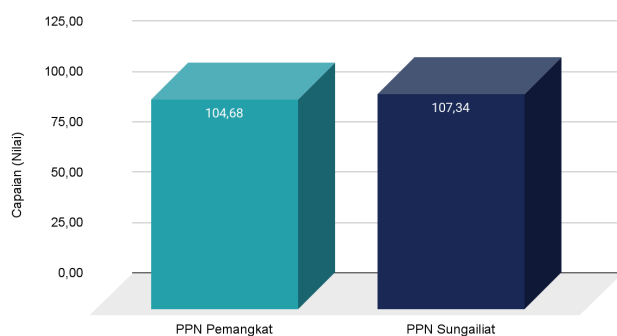
SS-7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat					
IKU-16		Nilai IKPA PPN Pemangkat					
Realisasi Triwulan IV (YoY)					2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
99,06	95,27	95,03	93,99	93,27	92,00	96,31	104,68

IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2025 dengan capaian 96,31. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2024 mengalami kenaikan 3,04 poin. Jika dibandingkan

dengan capaian terhadap target tahunan persentasenya sebesar 104,68. Berikut capaian IKPA PPN PEmangkat dari tahun 2020 s.d. 2025 sebagaimana diagram di samping. Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat capaian PPN Pemangkat sedikit lebih rendah 2,66 poin yaitu 104,68 berbanding 107,34 sebagaimana gambar disamping.



Perbandingan Capaian IK Nilai IKPA dengan PPN Sungailiat



Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan

anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan *revolving* UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

Guna mendukung ketercapaian IKU ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 93.092.000,00, untuk kegiatan :

- a. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp.16.412.000,00 terealisasi Rp.15.917.100,00 atau sebesar 96,98%.
- b. Honorarium Pengelola Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 76.680.000,00 terealisasi sebesar Rp.76.680.000,00 atau sebesar 100%.

Kegiatan yang menunjang kinerja ini adalah kegiatan yang diperoleh dengan indikator revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak,

Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, dan Kesalahan SPM. Dilakukan penyesuaian halaman tiga DIPA setiap awal triwulan, melakukan monitoring terhadap penyampaian SPM dan data kontrak, serta penyampaian capaian output setiap tanggal 10 pada bulan berjalan.

IK. 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)

Kinerja perencanaan anggaran merupakan proses perencanaan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dengan bobot penilaian capaian output 43,5%, efisiensi 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 18,2%, dan penyerapan anggaran 9,7%. Berikut adalah tabel capaian IKU tersebut (Tabel 20)

Tabel 20. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat			
IKU-17				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Pemangkat			
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
92,25	98,64	83,80	83,50	90,00	71,50	94,53	132,21

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2025, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 90, maka di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,53 poin yaitu 94,53.

Dari tahun 2020 s.d. 2025 capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu 98,64, berikut capaian dalam 5



tahun terakhir sebagaimana grafik di samping.

Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat yang capaiannya 120,00 PPN Pemangkat sedikit lebih tinggi 12,21 poin yaitu 132,21.

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan

nilai efisiensi. Faktor penghambat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

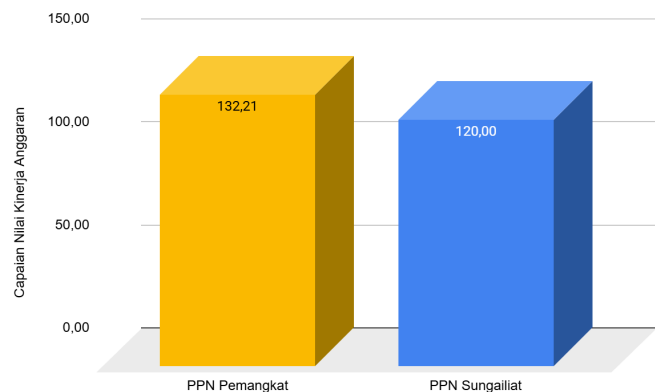
Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber Pencapaian IK ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN dan 1 (satu) orang Analis Keuangan, dan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.100.000,00 sampai dengan akhir triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 5.956.000,00 atau jika dipersentase sebesar 97,64%

penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Sampai dengan akhir triwulan IV 2025, belum ada realisasi dari kegiatan tersebut.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas adalah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

IK. 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permenpan dan RB No. 14 Tahun

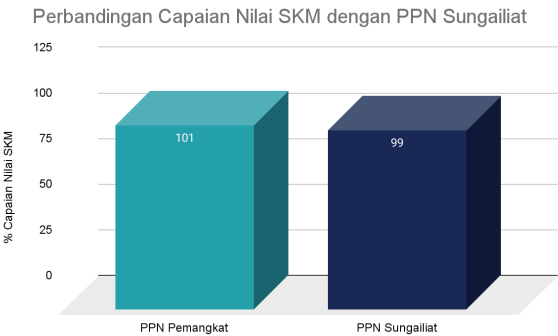


2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP. Adapun sampai dengan akhir triwulan IV 2025, capaiannya IKU sebagaimana tabel 21 berikut.

Tabel 21. Capaian IK Nilai SKM

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat			
IKU-18				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat			
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan
-	-	-	90,68	92,92	88,5	95,15	108

Capaian SKM pada triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 95,15 dari target yang telah ditentukan sebesar 88,5 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 108%. Target triwulanan maupun target tahunan sama, sehingga persentase capaiannya sama sebesar 108%.



Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, PPN Pemangkat sedikit lebih tinggi yaitu 1,8 poin sebagaimana gambar di atas.

Nilai ini diperoleh atas upaya PPN Pemangkat dengan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas, kompetensi SDM serta mendorong kepada setiap petugas layanan untuk selalu melakukan pengisian SKM pada setiap selesai melakukan pelayanan. Selain itu, petugas pelayanan juga wajib memberikan pendampingan

kepada pengguna jasa pada saat melakukan pengisian SKM sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menjawab pertanyaan pada *form* SKM.

Guna mendukung kegiatan didukung oleh 17 petugas pelayanan dan dibentuk SK Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SKM 2024. Disamping itu juga adanya penambahan SDM (PNS dan PPPK) sehingga beberapa pelayanan yang dahulu hanya ditangani 1 orang, saat ini dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan berakibat pada peningkatan pelayanan yang menjadi lebih baik

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini antara lain; (1) Melakukan peningkatan fasilitas, (2) Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SKM dan (3) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SKM kepada petugas dan pengguna jasa.

Guna mendukung IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.250.000,00 atau 100% untuk kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada bulan Desember.

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan sumber daya telah diupayakan dan dilaksanakannya pembagian tugas pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam menunjang setiap indikator kinerja. Berikut adalah efisiensi penggunaan anggaran per jenis kegiatan sampai dengan akhir tahu

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERIODE TRIWULAN IV 2025

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGAR AN (Rp)	REALISASI ANGGARAN S.D. TRIWULAN IV (Rp)
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja TKPU	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar		
					054.B Sosialisasi SOP jasa ke Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan	7.654.000	7.653.000,00

2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	2342.EBA.963 Layanan Data dan Informasi		
					052.A Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	1.800.000	1.640.000,00
					2341.QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		
					2341.QGA.001 Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	3.119.000	3.095.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau	Tim Kerja TKPU	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan		

	Optimal dan bertanggung jawab		dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		operasional sesuai standar		
					054.A Pelaksanaan Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan	20.840.000	20.270.000
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar		
					053.A Pembinaan pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan inspeksi pengendalian mutu di Pelabuhan Perikanan	1.800.000	1.800.000
					2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan		

					Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar		
					057.A Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	34.305.000	34.286.700,00
					057.B Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan	106.905.000	102.203.200
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja Kesyahbandaran	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar		

					051.A Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka dalam rangka mendukung PNBP Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)	36.747.000	36.351.000
					2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar		
					052.A Pengelolaan dan Operasional Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	1.400.000	1.390.000

					052.B Diseminasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan	-	
					2341.QKB.001 Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi		
					051.A Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	1.750.000	1.550.000
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas	Tim Kerja TKPU	2342.EBA.994 Layanan Perkantoran		

			Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		002.B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	482.280.000	480.770.386
					2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar		
					054.D Penyusunan Dokumen KKPR	5.450.000	5.450.000
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja TKPU	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar		
					055. Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan	10.900.000	10.317.000

4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Tim Kerja Kesyahbandaran			
		9	Persentase desain sarana pemanfaatan sumber daya ikan yang digunakan oleh stake holders perikanan tangkap (persen)				
		10	Persentase rekomendasi teknis teknologi pemanfaatan sumber daya ikan yang digunakan oleh stake holders perikanan tangkap				
		11	Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) lingkup				

	Perikanan Tangkap yang diusulkan (jumlah)				
12	Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) lingkup Perikanan Tangkap yang diperoleh dari Perumusan Standar (jumlah)				
13	Standar Nasional Indonesia (SNI) lingkup Perikanan Tangkap (jumlah) yang dikaji-ulang				
14	Persentase permohonan sarana penangkapan ikan yang diuji (persen)				

		15	Persentase permohonan sarana penangkapan ikan yang disertifikasi (persen)				
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan				
		17	Persentase Peningkatan Kompetensi Nelayan (persen)				
		18	Persentase kerjasama yang implementatif (persen)				
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		
					053.A Pelaksanaan zona integritas	1.600.000	1.260.000

		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		051.A Monitoring kinerjaku	3.900.000	3.480.000
					2342.EBA.994 Layanan Perkantoran		
					001.A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.155.113.000	6.014.346.056
					2342.EBC.954 Layanan Manajemen SDM		
					053.A Peningkatan Kompetensi Pegawai	4.000.000	3.725.000

				2342.EBA.994 Layanan Perkantoran		
				002.A Operasional Perkantoran	2.065.638.000	2.008.673.937
				2342.EBA.994 Layanan Perkantoran		
				002.C. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	58.900.000	58.900.000
				2342.CAN.955 Perangkat Pengolah Data dan komunikasi		
				051.A Alat Pengolah Data	137.800.000	137.183.001
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan	2342.EBA.994 Layanan Perkantoran		

			Perikanan Nusantara Pemangkat		002.C.521115 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000	6.800.000
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBA.994 Layanan Perkantoran		
					002.C.521115 Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	4.320.000	4.320.000
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan		
					054.A Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN)	16.412.00 0	15.917.100
					2342.EBA.994 Layanan Perkantoran		

				002.C.521115 Honorarium Pengelola Anggaran Kegiatan	76.680.00 0	76.680.000
				Efisisensi	257.049.0 00	-
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	2342.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
				052.A Perencanaan program dan Anggaran	6.100.000	5.956.000
				2342.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
				052.A Monitoring Laporan Berbasis Web	-	-
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan		

					operasional sesuai standar		
					054.C Forum konsultasi publik	5.250.000	5.250.000

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur. Laporan Kinerja 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap target tahunan dan capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, target akhir Renstra, dan capaian satker lain sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan capaian kinerja ini ada beberapa permasalahan, yakni :

- Perlu adanya peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara.

4.2 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SEBELUMNYA

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan III 2025) telah ditindaklanjuti pada periode ini dengan;

- Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesyahbandaran bersama instansi terkait, pengusaha dan stakeholder pelabuhan perikanan guna meningkatkan efektivitas fungsi kesyahbandaran dalam mendukung optimalisasi PNBP Pasca Produksi.
- Perbaikan/penambahan jaringan dan penambahan kamera cctv lingkungan pelabuhan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait lingkup pelabuhan perikanan

4.3 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang terjadi selama pencapaian kinerja tahun 2025, beberapa rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja sebagai berikut :

- Melakukan sinergi dengan KPP Pratama Slingkawang dalam rangkap memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Anam Tofani**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pemangkat


Anam Tofani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	964,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (niai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (niai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	488.300.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.037.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	8.993.049.000
Total Anggaran PPN Pemangkat Tahun 2025		9.518.386.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pemangkat



Anam Tofani



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Anam Tofani**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pemangkat


Anam Tofani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	964,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5

Data Anggaran :

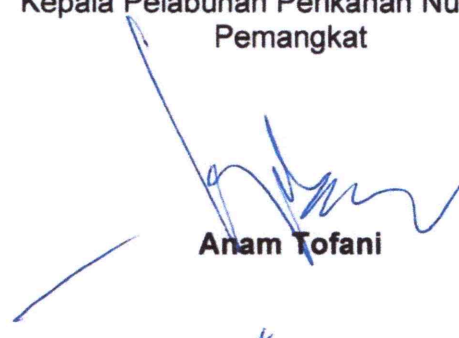
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	488.300.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	4.869.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	9.021.343.000
Total Anggaran PPN Pemangkat Tahun 2025		9.514.512.000

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pemangkat


Anam Tofani

**MATRIKS CASCADING PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
TAHUN 2025**

Sasaran Program (Lv I)	Indikator Kinerja (Lv I)	Target	Sasaran Kegiatan	IKU	Jenis Indikator Kinerja	Target	Periode Perhitungan	Metode Cascading
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	IKU	9.090,96	Triwulanan	Komponen Pembentuk
			Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	IKU	964,73	Triwulanan	Buat Baru
			Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	IKU	496	Triwulan	Buat Baru
				Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	IKU	0,26	Semester	Buat Baru
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	IKU	100	Tahunan	Buat Baru
				Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	IKU	87	Triwulanan	Buat Baru
				Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	IKU	100	Tahunan	Buat Baru
				Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	IKU	40	Tahunan	Buat Baru
				Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	IKU	30,1	Triwulan	Buat Baru
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	IKM	71,5	Tahunan	Komponen Pembentuk
				Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	IKM	87	Semester	Dipersempit
				Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	IKM	88	Tahunan	Dipersempit
				Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	IKM	76	Triwulanan	Komponen Pembentuk

**MATRIKS CASCADING PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
TAHUN 2025**

Sasaran Program (Lv I)	Indikator Kinerja (Lv I)	Target	Sasaran Kegiatan	IKU	Jenis Indikator Kinerja	Target	Periode Perhitungan	Metode Cascading
				Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	IKM	81	Tahunan	Dipersempit
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	IKM	85	Triwulan	Dipersempit
				Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	IKM	75,5	Tahunan	Buat Baru
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	IKM	88,5	Triwulanan	Dipersempit
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	IKM	92	Tahunan	Dipersempit

Sambas, 24 Januari 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pemangkat,

 Ditandatangani
Secara Elektronik

Anam Tofani

RINCIAN TARGET IKU 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	Target						
							TW I	TW II	s.d. TW II / SMT I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / SMT II / Tahunan
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Rp juta	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	192,95	289,42	289,42	482,37	482,37	964,73	964,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Ton	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	1.363,64	2.727,29	2.727,29	4.545,48	4.545,48	9.090,96	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						100,00	100,00
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai	Triwulanan	Rata-Rata	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						100	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						40,00	40,00
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai	Triwulanan	Rata-Rata	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Kapal	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	491	492	492	494	494	496	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Nilai	Semesteran	Rata-Rata		0,26	0,26			0,26	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						75,5	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persen	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	85	85	85	85	85	85	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						88	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Indeks	Semesteran	Nilai Posisi Akhir		82,00	82,00			87,00	87,00
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	76	76	76	76	76	76	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						81	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai	Semesteran	Nilai Posisi Akhir		85,00	85,00			92,00	92,00
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						71,5	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Indeks	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5

Sambas, 24 Januari 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pemangkat,



Anam Tofani

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERIODE TRIWULAN IV 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN S.D. TRIWULAN IV (Rp)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA			REALISASI KEGIATAN BERKALA			TINDAK LANJUT TRIWULAN SEBELUMNYA	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Okt	Nop	Des	Okt	Nop	Des			
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja TKPU	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar											Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesyahbandaran bersama instansi terkait, pengusaha dan stakeholder pelabuhan perikanan guna meningkatkan efektivitas fungsi kesyahbandaran dalam mendukung optimalisasi PNBP Pasca Produksi.	Perlu adanya peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara.	Dilakukan sinergi dengan KPP Pratama Singkawang dalam rangka memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara
				054.B Sosialisasi SOP jasa ke Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan	7.654.000	7.653.000,00	1,00	Kegiatan			1			1			
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	2342.EBA.963 Layanan Data dan Informasi											Perbaikan/penambahan jaringan dan penambahan kamera cctv lingkungan pelabuhan		
				052.A Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	1.800.000	1.640.000,00	1,00	Layanan			1			1			
				2341.QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi													
				2341.QGA.001 Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	3.119.000	3.095.000	1,00	Lembaga		1				1			
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3. Persentase permohonan pengusaha yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja TKPU	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar											Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait lingkup pelabuhan perikanan		
				054.A Pelaksanaan Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan	20.840.000	20.270.000	1	Kegiatan		1				1			
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar													
				053.A Pembinaan pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan inspeksi pengendalian mutu di Pelabuhan Perikanan	1.800.000	1.800.000	1	Kegiatan			1			1			
				2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar													
				057.A Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	34.305.000	34.286.700,00	1	Kegiatan	1			1					
				057.B Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan	106.905.000	102.203.200	1	Kegiatan			1			1			
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja Kesyahbandaran	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar													
				051.A Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka dalam rangka mendukung PNBP Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)	36.747.000	36.351.000	1	Kegiatan		1	1			1			
				2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar													
				052.A Pengelolaan dan Operasional Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	1.400.000	1.390.000	1	Kegiatan		1	1			1			
				052.B Diseminasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan	-		1	Kegiatan									
				2341.QKB.001 Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi													

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERIODE TRIWULAN IV 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN S.D. TRIWULAN IV (Rp)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA			REALISASI KEGIATAN BERKALA			TINDAK LANJUT TRIWULAN SEBELUMNYA	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	
										Okt	Nop	Des	Okt	Nop	Des				
				Tim Kerja TKPU	051.A Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	1.750.000	1.550.000	1	Kegiatan		1			1					
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBA.994 Layanan Perkantoran														
					002.B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	482.280.000	480.770.386	1	Layanan	1	1	1	1	1	1				
					2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar														
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja TKPU	054.D Penyusunan Dokumen KKPR	5.450.000	5.450.000	1	Unit			1				1			
					2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar														
					055. Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan	10.900.000	10.317.000	1	Kegiatan			1				1			
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Tim Kerja Kesyahbandaran															
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan																
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal														
			053.A Pelaksanaan zona integritas		1.600.000	1.260.000	1	Layanan			1				1				
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat																
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		051.A Monitoring kinerjaaku	3.900.000	3.480.000	1	Layanan										
					2342.EBA.994 Layanan Perkantoran														
					001.A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.155.113.000	6.014.346.056	1	Layanan	1	1	1	1	1	1	1			
					2342.EBC.954 Layanan Manajemen SDM														
					053.A Peningkatan Kompetensi Pegawai	4.000.000	3.725.000	1	Kegiatan			1				1			
					2342.EBA.994 Layanan Perkantoran														
					002.A Operasional Perkantoran	2.065.638.000	2.008.673.937	1	Layanan	1	1	1	1	1	1	1			
					2342.EBA.994 Layanan Perkantoran														
					002.C. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	58.900.000	58.900.000	1	Layanan			1				1			
					2342.CAN.955 Perangkat Pengolah Data dan komunikasi														
					051.A Alat Pengolah Data	137.800.000	137.183.001	1	Unit			1				1			
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBA.994 Layanan Perkantoran														
					002.C.521115 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000	6.800.000	12	Bulan	1	1	1	1	1	1	1			
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBA.994 Layanan Perkantoran														
					002.C.521115 Honorarium Pengurus/Pyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	4.320.000	4.320.000	12	Bulan	1	1	1	1	1	1	1			
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan														
					054.A Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN)	16.412.000	15.917.100	1	Layanan	1	1	1	1	1	1	1			
					2342.EBA.994 Layanan Perkantoran														
					002.C.521115 Honorarium Pengelola Anggaran Kegiatan	76.680.000	76.680.000	12	Bulan	1	1	1	1	1	1	1			
					Elfisisensi	257.049.000	-												
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat		2342.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
					052.A Perencanaan program dan Anggaran	6.100.000	5.956.000	1	Layanan			1				1			
					2342.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
					052.A Monitoring Laporan Berbasis Web	-	-	1	Layanan										
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	2338.BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar																	
		054.C Forum konsultasi publik	5.250.000	5.250.000	1	Kegiatan		1					1						